

BAB III

DINAMIKA KONFLIK MAROKO-SAHARA BARAT

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan.¹ Kata sengketa, perselisihan, pertentangan di dalam Bahasa Inggris sama dengan “*conflict*” atau “*dispute*”.² Keduanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat dibedakan. Kosa kata “*conflict*” dalam Bahasa Indonesia diserap menjadi konflik, sedangkan kosa kata “*dispute*” diterjemahkan dengan kata sengketa.

Konflik atau sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih yang berselisih perkara dalam pengadilan.³ Konflik atau sengketa terjadi juga karena adanya perbedaan persepsi yang merupakan penggambaran tentang lingkungan yang dilakukan secara sadar yang didasari pengetahuan yang dimiliki seseorang, lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan fisik maupun sosial.⁴ Sebuah konflik berkembang menjadi sengketa bila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau pihak lain.

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hal 643.

² John.M. Echlos dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia dan Indonesia Inggris, Penerbit Gramedia, Jakarta, 1996, hal. 138.

³ Sudarsono, Kamus Hukum, Cetakan ke-3, Penerbit Rineka Cipta. Jakarta, 2002, hal. 433.

⁴ Koentjaraningrat, Kebudayaan Metaliteit dan Pembangunan, Gramedia, Jakarta, 1982, hal 103.

Pertikaian atau sengketa, keduanya adalah yang dipergunakan secara bergantian dan merupakan terjemahan dari “*dispute*”. John G. Merrils⁵ memahami persengketaan sebagai terjadinya perbedaan pemahaman akan suatu keadaan atau obyek yang diikuti oleh pengklaim oleh satu pihak dan penolakan di pihak lain. Karena itu, sengketa internasional adalah perselisihan yang tidak secara eksklusif melibatkan negara, dan memiliki konsekuensi pada lingkup internasional. Dilihat dari konteks Hukum Internasional, sengketa dapat diartikan sebagai ketidaksepakatan salah satu subyek mengenai sebuah fakta, hukum, atau kebijakan yang kemudian dibantah oleh pihak lain atau adanya ketidaksepakatan mengenai masalah hukum atau fakta-fakta atau konflik mengenai penafsiran atau kepentingan antara 2 bangsa yang berbeda. Berbagai metode penyelesaian sengketa telah berkembang sesuai dengan tuntutan jaman. Metode penyelesaian sengketa dengan kekerasan, misalnya perang, invasi, dan lainnya.

A. Profil Singkat Maroko dan Sahara Barat

Sebelum masuk pada pokok pembahasan, penulis menjabarkan terlebih dahulu profil masing-masing negara secara singkat. Sahara Barat yang menjadi daerah utama dalam konflik teritori ini menjadikan kondisi perpolitikan wilayahnya naik-turun dan tidak ada jaminan terhadap damainya kondisi wilayah mereka. Meskipun beragam cara pernah dilakukan dalam meredakan konflik dan berbagai

⁵ Dapat dilihat dalam, Jawahir Tantowi dan Pranoto Iskandar, Hukum Internasional Kontemporer, PT.RefikaAditama, Bandung, .hlm 224.

negara mencoba untuk menyatukan pikiran dalam konferensi tingkat tinggi, tetap saja belum menemukan kata sepakat yang memuaskan berbagai pihak.

1. Maroko

Maroko (Bahasa Arab: المغرب al-Maghrib, Perancis: Maroc), secara resmi dikenal sebagai Kerajaan Maroko adalah sebuah negara berdaulat yang terletak di wilayah Maghreb di Afrika Utara. Secara geografis, Maroko ditandai dengan pegunungan yang besar dan kasar dari padang pasir. Memiliki Laut Atlantik dan Laut Mediterania di sepanjang garis pantainya.

Maroko memiliki populasi lebih dari 33.800.000⁶ dan luas 446.550 Km². Ibukotanya adalah Rabat dan kota terbesar adalah Casablanca. Kota-kota besar lainnya termasuk Marrakesh, Tangier, Tetouan, Salé, Fes, Agadir, Meknes, Oujda, Kenitra, dan Nador. Sebuah kekuatan sejarah regional yang menonjol, Maroko memiliki sejarah kemerdekaan yang tidak dimiliki oleh tetangganya.

Karena dasar dari negara Maroko pertama dengan Idris I pada 789, negeri ini telah diperintah oleh serangkaian dinasti independen, mencapai puncaknya di bawah Almoravid dan Almohad dinasti, mencakup bagian dari Iberia dan Afrika Barat Laut. Mariniyyah dan Saadi dinasti melanjutkan perjuangan melawan dominasi asing, dan Maroko satu-satunya negara Afrika

⁶ "Note sur les premiers résultats du Recensement Général de la Population et de l'Habitat 2014". HCP. 2015. Retrieved 22 December 2015.

Utara yang terhindar dari pendudukan Ottoman. Pada tahun 1912 Maroko dibagi menjadi protektorat Perancis dan Spanyol, dengan zona internasional di Tangier, dan kembali merdeka pada tahun 1956. Budaya Maroko merupakan perpaduan Arab, adat Berber, Sub-Sahara Afrika, dan pengaruh Eropa.

Maroko mengklaim wilayah non-pemerintahan sendiri, Sahara Barat sebagai Provinsi disebelah selatannya. Maroko menganeksasi wilayah pada tahun 1975, yang mengarah ke perang gerilya dengan pasukan Sahara sampai pada gencatan senjata di tahun 1991. Proses perdamaian sejauh ini gagal untuk memecahkan kebuntuan politik.

Maroko adalah sebuah monarki konstitusional dengan parlemen yang dipilih. Raja Maroko memegang kekuasaan eksekutif dan legislatif yang luas, terutama dalam militer, kebijakan luar negeri dan urusan agama. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh pemerintah, sedangkan kekuasaan legislatif dipegang baik pemerintah dan dua kamar parlemen, Majelis Perwakilan Rakyat dan Majelis Anggota Dewan. Raja dapat mengeluarkan dekrit yang disebut dahirs yang memiliki kekuatan hukum. Dia juga bisa membubarkan parlemen setelah berkonsultasi dengan Perdana Menteri dan Presiden Mahkamah Konstitusi.

Kota-kota besar yang terdapat di Maroko diantaranya: Rabat, Marrakesh, Casablanca, Fes dan Tangier. Seperti Aljazair, Maroko juga dihuni oleh orang-orang berkebangsaan Arab dan Berber. Negeri ini

didominasi oleh dataran pesisir, gurun dan pegunungan. Islam merupakan agama mayoritas di Maroko, dimana islam datang ke Maroko pada abad ke-7. Jumlah penduduk Maroko berkisar 31.968.361 orang dengan luas wilayah 710.850 Km (estimasi Juli 2011), dan mengalami kemajuan signifikan sejak dipimpin oleh Raja Mohammed VI. Penduduk asli Maroko adalah suku Berber.⁷

Maroko merupakan negara satu-satunya di Afrika yang tidak tergabung didalam African Union, tetapi negara tersebut merupakan anggota organisasi lainnya seperti Liga Arab, Arab Maghreb Union, OKI, Mediterania Dialogue, Group 77 dan Major Non-NATO Ally of USA. Maroko merdeka dari Perancis 18 November 1956 dengan bahasa resmi negara arab dan Perancis.⁸ Dan Maroko bersebelahan dengan Mauritania dan Sahara Barat di selatan, Aljazair di timur dan disebelah utara Spanyol dan Portugal yang dibatasi laut Mediteranian.

2. Sahara Barat

Sahara Barat (Listeni / ,wes.tərn səhɑ:.rə, -hæərə, -hærə /; Bahasa Arab: *الصحراء الغربية* As-Sahra 'al-Gharbiyah; Berber: Tanezroft Tutrimt) adalah wilayah yang disengketakan di wilayah Maghreb, Afrika utara. Berbatasan dengan Maroko di utara, Aljazair di timur laut, Mauritania di

⁷ <http://www.kemlu.go.id/rabat/Pages/CountryProfile.aspx?l=id>

⁸ Kemlu.go.id, ibid

sebelah timur dan selatan, dan Samudra Atlantik di barat. Luas daratannya sebesar 266.000 kilometer persegi. Ini adalah salah satu wilayah yang paling jarang penduduknya di dunia, terutama terdiri dari dataran gurun. Populasi diperkirakan lebih dari 500.000,⁹ yang hampir 40% hidup di Laayoune, kota terbesar di Sahara Barat.

Diduduki oleh Spanyol pada akhir abad ke-19, Sahara Barat telah terdaftar di PBB menjadi wilayah non-pemerintahan sendiri sejak tahun 1963 karena permintaan Maroko. Pada tahun 1965, Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi pertama pada Sahara Barat, meminta Spanyol untuk mendekolonisasi wilayah itu.¹⁰ Satu tahun kemudian, resolusi baru disahkan oleh Majelis Umum yang meminta referendum diselenggarakan oleh Spanyol untuk penentuan nasib sendiri.

Pada tahun 1975, Spanyol melepaskan kontrol administratif di wilayah tersebut untuk dijadikan satu administrasi bersama oleh Maroko (yang telah secara resmi mengklaim wilayah Sahara Barat sejak tahun 1957)¹¹ dan Mauritania¹². Perang pun meletus diantara negara-negara sekitar Sahara. Sahrawi gerakan pembebasan nasional, Front Polisario, yang

⁹ Department of Economic and Social Affairs Population Division (2009). "World Population Prospects, Table A.1" (PDF). 2008 revision. United Nations. Retrieved 12 March 2009.

¹⁰ United Nations General Assembly (16 December 1965). "RESOLUTIONS ADOPTED BY THE GENERAL ASSEMBLY DURING ITS TWENTIETH SESSION, resolution 2072 (XX), QUESTION OF IFNI AND SPANISH SAHARA

¹¹ González Campo, Julio. "Documento de Trabajo núm. 15 DT-2004. Las pretensiones de Marruecos sobre los territorios españoles en el norte de África (1956–2002)" (PDF) (in Spanish). es:Real Instituto Elcano. p. 6.

¹² "Milestones in the Western Sahara conflict". Archived from the original on 27 February 2012.

memproklamasikan Republik Demokratik Arab Sahrawi (SADR) dengan pemerintah di pengasingan di Tindouf, Aljazair. Mauritania mundur pada konflik ini di tahun 1979 dan Maroko akhirnya mengamankan kendali atas asas de facto dari sebagian besar wilayah, termasuk semua kota-kota besar dan sumber daya alamnya.

Sejak perjanjian gencatan senjata yang dipelopori oleh PBB pada tahun 1991, dua pertiga dari wilayah (termasuk sebagian besar pantai Atlantik) telah berada di bawah kendali de facto Maroko, didukung oleh Perancis juga Amerika Serikat, dan sisanya oleh SADR yang didukung sepenuhnya oleh Aljazair.¹³ Kedua pihak yaitu Maroko dan Polisario telah berusaha untuk meningkatkan klaim mereka dengan mendapatkan pengakuan formal, pada dasarnya dari Afrika, Asia, dan negara-negara Amerika Latin di negara berkembang.

Front Polisario telah memenangkan pengakuan formal untuk SADR dari 37 negara, dan telah diperpanjang keanggotaan dalam Uni Afrika. Maroko telah memenangkan pengakuan atau dukungan untuk posisinya dari beberapa pemerintah Afrika dan dari sebagian besar Liga Arab.¹⁴ Pada tahun 2006, tidak ada negara anggota lain dari PBB yang telah mengakui kedaulatan Maroko atas Sahara Barat.

¹³ Baehr, Peter R. *The United Nations at the End of the 1990s*. 1999, page 129.

¹⁴ "Arab League Withdraws Inaccurate Moroccan maps", *Arabic News, Regional-Morocco, Politics*, 17 December 1998. Retrieved 24 August 2006

B. Latar Belakang Konflik Maroko-Sahara Barat

Maroko seperti diketahui adalah sebuah negara yang termasuk dalam kawasan Timur Tengah. Namun, Maroko telah menyimpan konflik selama lebih dari 30 tahun dengan Sahara Barat. Sahara Barat yang luasnya sama dengan Inggris terletak di barat laut benua Afrika. Sahara Barat merupakan peninggalan kolonialisme Eropa tahun 1880 sampai dengan tahun 1990 dimana pada era tersebut, negara-negara utama di Eropa saling bersaing untuk mendapatkan wilayah Afrika.

Ketika zaman penjajahan itu, Spanyol mendapatkan wilayah Sahara Barat dan melakukan kolonisasi di Sahara Barat. Namun, saat itu Spanyol sebagai negara Eropa yang paling lemah, sehingga Spanyol hanya mendapatkan separuh dari wilayah Sahara Barat, sedangkan Perancis mendapatkan Maroko, Mauritania, dan Aljazair yang berada di sekitar Sahara Barat. Sahara Barat memiliki banyak sumber-sumber mineral termasuk fosfat dan bijih besi, wilayah ini pun merupakan salah satu lahan perikanan terbaik di dunia sehingga Spanyol pun mendapatkan keuntungan ketika menguasai Sahara Barat.

Karena kolonialisme yang dilakukan oleh Spanyol, maka kelompok yang mendukung kemerdekaan di Sahara barat pada tahun 1973 mendirikan gerakan Polisario sebagai gerakan pembebasan Sahara Barat yang bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan kawasan Sahara Barat dari koloni Spanyol. gerakan ini mendapat dukungan yang sangat besar dari rakyat setempat dan karena kuatnya

dukungan masyarakat pada gerakan Polisario, maka membuat tentara Spanyol mundur dari Sahara Barat pada tahun 1975.

Dengan demikian, perjuangan gerakan Polisario yang telah membuat mundur Spanyol berakhir dan gerakan Polisario kemudian memproklamkan berdirinya Republik Demokratik Arab Sahrawi (SADR). Namun, dengan berdirinya SADR ternyata belum membuat masalah di Sahara Barat berakhir karena ternyata Spanyol menyerahkan koloni tersebut pada Maroko dan Mauritania dengan imbalan tertentu termasuk mengeksploitasi ikan di lepas pantai dan menambang fosfat, tetapi kesepakatan tersebut terlampau rahasia sehingga publik dan media pun tidak mengetahui isi kesepakatan tersebut.

Beberapa tahun kemudian, karena tekanan dari sejumlah pihak luar pada tahun 1979 Mauritania mundur dari Sahara Barat, sehingga hanya Maroko saja yang menjadi koloni tunggal di Sahara Barat. Rakyat Sahara Barat kembali mengalami penjajahan akibat pendudukan Maroko di Sahara Barat dimana Maroko melakukan invasi yang brutal pada rakyat Sahara Barat yang tetap tinggal di tanah air dimana mereka senantiasa ditahan, dipenjara, dan diculik oleh angkatan pendudukan Maroko. Mereka yang ingin melarikan diri dihalangi oleh tembok sepanjang 2.700 Km yang membelah Sahara Barat dalam zona pesisir yang diduduki Maroko dan bagian dalam yang dikuasai Republik Saharawi. Selain itu, ditanam lebih dari 3 juta ranjau darat dan ditempatkannya Peran PBB dalam Penyelesaian Konflik antara Maroko dan Sahara Barat 120.000 tentara Maroko di Sahara Barat.

C. Sejarah Konflik Perbatasan Maroko-Sahara Barat

Pada tahun 1957, wilayah Sahara Barat diklaim Maroko. Disisi lain, pasukan Spanyol berhasil melakukan penyerangan terhadap militer Maroko dan membuat pasukan militer Maroko mundur. Pada tahun 1958, Spanyol secara resmi menyatukan Rio de Oro dan Saguia el-Hamra menjadi Provinsi Spanyol yang dikenal sebagai Spanyol Sahara. Namun, situasi tidak kondusif dengan adanya klaim Mauritania yang baru merdeka pada tahun 1960.

Ketika koloni Eropa yaitu Spanyol dan Perancis berhasil memasuki wilayah Maroko mereka telah menyepakati perjanjian di Fes untuk membagi dua wilayah Maroko untuk dijajah yaitu bagian utara Maroko untuk Perancis dan bagian selatan Maroko untuk Spanyol. Hal ini menyebabkan perbedaan wilayah Maroko karena pemisahan wilayah Maroko yang dilakukan oleh koloni Spanyol dan Perancis. Sehingga pada masa itu Sahara Barat terpisah dengan Maroko. Perancis menjadi protektorat di wilayah utara Maroko, sementara Spanyol menjajah wilayah selatan Maroko yang juga dikenal sebagai Sahara Barat. Pada tahun 1956, Perancis meninggalkan wilayah utara Maroko. Sejak itu, upaya para pejuang Maroko menyatukan kembali wilayah kerajaan Maroko semakin diintensifkan dan mendapatkan momentum pada tahun 1975, ketika Spanyol angkat kaki menyusul krisis ekonomi di dalam negeri.

Sahara Barat merupakan daerah koloni Spanyol antara tahun 1884-1976. Fakta secara hukum berdasarkan Resolusi 1514 (XV) tanggal 14 Desember tahun 1960 mengenai penyerahan kemerdekaan terhadap negara-negara koloni, Majelis Umum PBB mendesak Spanyol agar Sahara Barat mendapatkan dekolonisasi dari Spanyol berdasarkan asas penentuan nasib sendiri (self-determination). Spanyol menyetujui usulan referendum untuk menentukan nasib Sahara Barat, dibawah pengawasan PBB, Raja Hassan, kepala Negara Maroko melalui Menteri Luar Negerinya pada tanggal 30 September dan 2 Oktober 1974.

Atas desakan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar negeri, pada akhirnya Spanyol pun memberi kemerdekaan Sahara Barat melalui “Kesepakatan Madrid 1975”. Akan tetapi, Pasca penarikan militer Spanyol, Maroko langsung mengambil alih Saguia El-Hamra, sedangkan Mauritania mencaplok Rio De Oro, dimana keduanya merupakan wilayah Sahara Barat. Tetapi disaat yang sama, pada 27 Februari 1976 Front Polisario didukung Aljazair juga memproklamasikan Republik Demokratik Arab Sahrawi (RDAS). Dan secara sungguh-sungguh, RDAS melancarkan perang gerilya untuk meraih kemerdekaan terhadap penjajah baru yang dilakukan oleh Maroko dan Mauritania. Inilah awal terjadinya konflik antara Maroko dan Sahara Barat. Rakyat yang tidak mau bergabung dengan Maroko kemudian terpaksa mengungsi di area yang dikuasai oleh Polisario (tentara gerilya pengungsi). Mereka adalah orang-orang Sahrawi. Penduduk asli yang selama puluhan tahun menjadi warga kelas dua di tanahnya sendiri.

Secara perlahan, Mauritania pun menarik diri lalu mengakui kemerdekaan RDAS. Sikap ini sempat menimbulkan perpecahan antara Mauritania dan Maroko. Sebaliknya, Maroko bukannya melepas El Hamra justru mengklaim serta menganeksasi wilayah tersebut pada Agustus 1979 secara sepihak dan wilayah Rio De Oro ditinggalkan oleh Mauritania. Akhirnya sekitar 25% wilayah Sahara Barat menjadi kekuasaan RDAS, dan selebihnya dikendalikan oleh Maroko. Kekuasaan RDAS diakui 58 provinsi, sementara 22 provinsi menarik diri dan 12 provinsi lain akan menentukan sikap setelah ada referendum PBB.

Secara regional ada 75 negara mengakui dan menganggap RDAS sebagai anggota Uni Afrika (Africa Union/AU, sekarang disebut OAU), namun ia belum sepenuhnya mendapat hak sebagai negara merdeka dan berdaulat. Hingga kini pusat pemerintahan dan militer RDAS berada di Tindouf, Aljazair sehingga pernah membuat panas hubungan politik antara Maroko dan Aljazair bahkan sempat memutus hubungan diplomatik. Kemudian di Dewan Keamanan PBB pun membentuk Misi PBB (MINURSO) untuk memantau gencatan senjata serta untuk menyelenggarakan suatu referendum bagi rakyat Sahara Barat agar memungkinkan mereka untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Akan tetapi, referendum tersebut tidak pernah terwujud.

Mahkamah Internasional mengemukakan bahwa terdapat ikatan historis antara wilayah Sahara Barat dengan Mauritania maupun Maroko tetapi hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk kedaulatan territorial di western sahara antara maroko ataupun Mauritania. Sahara Barat bukanlah merupakan wilayah *terra nullius*

(tidak dimiliki siapapun) karena telah ada organisasi sosial dan politik yang diwakili oleh para kepala suku yang memegang kendali atas wilayah tersebut. Dalam kasus western sahara ini dapat dilihat bahwa faktor ikatan sejarah saja tidak dapat digunakan untuk menyatakan sebuah wilayah merupakan bagian dari wilayahnya. Dimana Negara tersebut harus dapat membuktikan telah melakukan aksi-aksi perjuangan internal maupun internasional terhadap wilayah tersebut dan juga melakukan kendali penuh terhadap wilayah yang telah diklaimnya tersebut.

Sahara dapat dikatakan merupakan wilayah bebas dimana tidak terdapat kedaulatan sendiri maupun badan hukum di wilayah tersebut. Sehingga Sahara Barat memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri (*self determination*). Hal ini sesuai dengan Resolusi MU No. 1514(XV) dan juga merupakan suatu prinsip hukum umum (*ius cogens*) dalam hukum internasional.

D. Awal Mula Perseteruan Aljazair-Maroko

Pada abad ke-15 negara-negara Eropa mulai tertarik dengan Sahara Barat karena adanya perdagangan emas, kulit unta dan getah Arab. Akhir abad ke- 15 tindakan koloni Spanyol yang pertama yaitu mengeksploitasi pantai Sahara Barat. Namun upaya Spanyol untuk menjajah wilayah ini tidak membawa hasil. Diakhir abad ke-19 Sahara Barat dijadikan sebagai protektorat Spanyol menurut konferensi Berlin pada tahun 1958 menjadi provinsi seberang-lautan. Wilayah yang sebelumnya

dikenal dengan Sahara Spanyol ini, pada tahun 1975 kemudian oleh PBB dikenal dan diberi nama Sahara Barat.¹⁵

Pada tahun 1970 Maroko berada di tengah-tengah situasi geopolitik yang akan mengalami perubahan secara signifikan. Dan wilayah yang berada diselatan Maroko, yaitu Sahara Barat merupakan salah satu wilayah kolonial terakhir yang terjadi di Afrika. Sementara itu Raja Hassan II dari Maroko dijadikan sebagai seseorang yang paling mumpuni, mempunyai daya, kekuatan untuk menjadi pemimpin dan pengambil alihan wilayah Sahara Barat oleh Maroko.

Dilain pihak, sekelompok mahasiswa dari Universitas Rabat memulai gerakan untuk melawan kekuasaan kolonial. Di bulan Mei 1973 kelompok ini secara resmi menamai diri mereka Front Polisario (The Polisario Front)¹⁶ dan mereka dengan yakin meminta dukungan dari bangsa-bangsa Maghribi agar mendukung penentuan akhir mendapatkan kendali di Sahara Barat.¹⁷ Kemudian setelah menerima dukungan dari Kolonel Qadhafi, mereka pun memulai kampanye-kampanye gerilya. Dimulai dengan serangan-serangan terhadap *Garnisun* Spanyol (Pasukan yang ditempatkan didalam suatu kota) dan pos-pos di gurun, lalu menargetkan serangan-serangan berikutnya kepada militer Maroko.¹⁸ Front Polisario ini pun mensolidkan tujuan visi dan misi mereka dengan memosisikan diri mereka sebagai gerakan yang bertujuan

¹⁵ Seran Selviana, *Upaya Sahara Barat Menjadi Negara Sendiri*, 2003.

¹⁶ Polisario is an acronym for the Spanish translation of the Popular Front for the Liberation of Saguia el-Hamra and Río de Oro, the two main geographic regions that make up the Western Sahara.

¹⁷ Tony Hodges, *Western Sahara: The Roots of a Desert War*. (Westport, Conn: Lawrence Hill & Co., Publishers, Inc., 1983) 158.

¹⁸ Hodges (1983) 161; Maria J. Stephan and Jacob Mundy, "A Battlefield Transformed: From guerilla resistance to mass nonviolent struggle in the Western Sahara." *Journal of Military and Strategic Studies*, 8, no. 3, (Spring 2006), 19

untuk mendapatkan pembebasan nasional dan mendapatkan kemerdekaan secara penuh.¹⁹

Pada bulan Oktober 1975, Mahkamah Internasional ICJ (*International Court of Justice*) mengatur pengesahan dari hak masyarakat Sahrawi untuk menentukan nasib sendiri, tetapi Hassan II menolak referendum karena dia menegaskan bahwa daerah Sahara Barat merupakan daerah kekuasaannya.²⁰ Raja Hassan II pun tidak puas dengan keputusan yang ditawarkan PBB, lalu ia mengadakan relokasi terhadap 350.000 relawan, tentara dan pemukim Maroko agar tinggal di Sahara Barat. Proyek besar ini pun dikenal sebagai Green March (Gerakan Hijau) karena sesuai dengan warna suci umat islam.²¹

Aljazair melihat langkah ini hanya sebagai manifestasi terbaru dari keinginan Maroko dalam masalah ekspansi teritorial dan Aljazair pun mulai mendukung Polisario dalam pelaksanaan referendum. Seperti yang selalu menjadi ciri dalam perselisihan wilayah, setiap pihak merasa paling eksklusif dan memiliki hak menguasai, menjadikan pembicaraan perdamaian semakin terasa sulit.²²

¹⁹ Polisario Front, quoted in: Hodges (1983) 163

²⁰ Yahia H. Zoubir, "Stalemate in Western Sahara: Ending International Legality." *Middle East Policy*, 14:4 (2007) 161-2

²¹ Eric Jensen, *Western Sahara: Anatomy of a Stalemate*. (Boulder, Colo: Lynne Rienner Publishers, Inc., 2005) 27.

²² Steven R. Ratner, "Land Feuds and Their Solutions: Finding International Law beyond the Tribunal Chamber" *The American Journal of International Law*, 100: 4. (Oct. 2006) 811

E. Terlibatnya Perserikatan Bangsa-Bangsa

Pada tahun 1991, PBB datang untuk menengahi konflik yang terjadi antara Maroko dan Sahara Barat ke kawasan Sahara Barat dan kedua pihak yang bertikai sepakat menyerahkan nasib kawasan Sahara Barat pada sebuah referendum, kemudian PBB pun mengeluarkan Resolusi Dewan Keamanan no. 690 pada 29 April tahun 1991 dan mengirimkan pasukan penjaga perdamaian MINURSO sekaligus mengawasi jalannya proses referendum diantara kedua pihak yang bertikai.

Meskipun Aljazair telah menjadi pendukung yang paling berpengaruh dari Rakyat Sahrawi dan Polisario, tapi *arbiter* yang paling berpengaruh adalah Mantan Menteri Luar Negeri AS James Baker.²³ Dialah salah seorang yang akan menjadi penengah terhadap kasus wilayah Sahara Barat. Pada tahun 1997, tak lama setelah menduduki jabatan Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan menunjuk Baker sebagai perwakilan khusus ke Sahara Barat.²⁴

Baker memediasi antara Front Polisario dan Maroko, lalu pada tahun 1999 disampaikan rencana untuk penentuan nasib sendiri (referendum) dan daftar pemilih yang memenuhi syarat untuk referendum, tapi Maroko tidak tunduk pada proses referendum, ini menunjukkan sekali lagi dari beberapa ketidaksepakatan antar para pihak. Saat itulah Annan dan Baker, keduanya mulai serius mendukung alternatif solusi referendum. Dalam upaya terakhir untuk menegakkan putusan ICJ yang

²³ Issaka K. Souaré, "Western Sahara: Is there light at the end of the tunnel?" Institute for Security Studies paper 155. November 2007. 4-6

²⁴ Yahia H. Zoubir, and Karima Benabdallah-Gambier, "The United States and the North African Imbroglia: Balancing Interests in Algeria, Morocco, and the Western Sahara" Mediterranean Politics 10: 2 (2005) 185-6

mengatur referendum, Baker menyerahkan "Baker Plan II" pada awal 2003. Meskipun keberatan, Aljazair dan Rakyat Sahrawi secara tiba-tiba menyetujui proposal penolakan Maroko dan mengungkapkan ada itikad tidak baik dari Maroko sebagai pihak yang menentang.

Baker Plan II menyerukan kepada Dewan Keamanan PBB untuk menegakkan pelaksanaan rencana itu (sebuah surat peringatan bahwa Maroko dan Perancis akan selalu menentang). Pengunduran diri frustrasi Baker pada tahun 2004 menandai berakhirnya keterlibatan Amerika Serikat yang paling gencar pengaruhnya dalam sengketa ini antara Maroko dan Aljazair yang didukung Polisario.

Keruntuhan Baker Plan II ini adalah bukan sesuatu hal yang kecil, karena Perancis merupakan pelindung kepentingan Maroko di Dewan Keamanan PBB (DK PBB). Ini menjadi menarik karena bagaimana peran Perancis yang cukup berpengaruh di bekas koloninya. Perancis dapat diandalkan untuk memblokir setiap resolusi PBB yang mana secara paksa akan menerapkan solusi terhadap Sahara Barat yang tidak sejajar dengan Rabat dan Perancis juga melihat bahwa kedaulatan Maroko harus tetap utuh.²⁵ Dengan kerajaan Maroko sebagai salah satu mitra dagang utamanya, Perancis telah menggunakan hak veto DK PBB yang lebih dari sekali untuk menggagalkan resolusi advokasi terhadap hak rakyat Sahrawi dalam penentuan nasib sendiri.²⁶

²⁵ Yahia H. Zoubir "Stalemate in Western Sahara: Ending International Legality." *Middle East Policy*, 14:4 (2007) 168

²⁶ See Zoubir (2007) and Zoubir and Benabdallah-Gambier (2005) for discussion on France's explicit support for Morocco.

Hasil dari referendum tersebut, yaitu dicapainya sebuah kesepakatan diadakannya perjanjian gencatan senjata untuk meredam konflik yang terjadi, tetapi kedua belah pihak melanggar perjanjian tersebut hingga pada akhirnya kontak senjata pun kembali terjadi yang membuat korban kembali berjatuhan. PBB pun tetap mengutus MINURSO untuk terus mengawasi bahkan meminimalisir frekuensi kontak senjata tersebut. MINURSO dihadirkan di kawasan ini untuk dapat membantu mengembalikan semangat hidup pada rakyat akibat dari konflik tersebut, dan pasukan penjaga perdamaian ini juga dipersiapkan untuk menerima batasan-batasan sosial dalam kehidupan pribadi dan publik demi menjalankan misi yang dimandatkan pada mereka. Dalam menjalankan misinya, pasukan penjaga perdamaian diharapkan dapat menjaga segala tingkah lakunya dengan sangat baik karena masyarakat Internasional akan secara ketat mengawasinya, dalam segi positif maupun negatif yang dilakukan pasukan penjaga perdamaian akan sangat memberikan dampak yang besar bagi keberhasilan misinya.

Dalam menjalankan misinya sebagai penjaga perdamaian, maka pasukan penjaga perdamaian harus sesuai dengan piagam PBB juga ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga hukum perikemanusiaan Internasional dimana didalamnya termaktub kode-kode etik serta norma-norma sebagai standarisasi yang harus dipatuhi terutama landasan dasar yaitu hak asasi manusia. Pasukan penjaga perdamaian harus dapat membawa nama baik PBB dan juga negaranya dan sejauh ini pasukan penjaga perdamaian telah mampu berfungsi sesuai mandat yang diberikan.

Mandat MINURSO adalah sebagai berikut :

1. Mengawasi berjalannya gencatan senjata
2. Melakukan verifikasi atas kesepakatan pengurangan pasukan Maroko di wilayah sengketa
3. Mengawasi pembatasan pasukan Maroko dan Polisario di lokasi-lokasi yang telah ditentukan
4. Memastikan pelepasan tahanan-tahanan politik Sahara Barat
5. Mengatur pertukaran tawanan perang yang ditentukan oleh International Committee of The Red Cross (ICRC)
6. Memulangkan pengungsi-pengungsi Sahara Barat
7. Mengidentifikasi dan mendaftarkan penduduk Sahara Barat untuk persiapan referendum
8. Mengorganisir dan memastikan sebuah referendum adil dan bebas dan mengumumkan hasilnya
9. Mengurangi ancaman dari ranjau tambang serta ranjau dan artileri-artileri yang belum meledak

Dalam keterlibatan PBB pada saat menengahi konflik yang terjadi antara Maroko dan Sahara Barat, PBB telah beberapa kali memperpanjang mandat MINURSO di area konflik dan mandat MINURSO pun akan diperpanjang hingga bulan April tahun 2014 yang kemudian akan terus diperpanjang selama konflik antara Maroko dan Sahara Barat belum berakhir. Hal ini dapat kita lihat bahwa peran organisasi Internasional cukup signifikan dengan mengirimkan pasukan penjaga

perdamaian di kawasan konflik walaupun konflik yang terjadi berlangsung cukup lama dan sampai saat ini pun belum berakhir, tetapi PBB tetap memperpanjang mandatnya untuk tidak menarik pasukan penjaga perdamaian di area konflik walaupun tidak diketahui entah sampai kapan konflik tersebut berakhir karena PBB ingin mewujudkan misinya yaitu untuk menciptakan perdamaian dunia.

Tabel : Timeline Konflik Sahara Barat

1884	Spainol mendapatkan kendali dan kekuasaan di wilayah Spanyol Sahara (Dikenal sebagai Sahara Barat)
1956	Maroko merdeka dari Perancis
1957	Sahara Barat dimasuki oleh tentara bersenjata Maroko tetapi berhasil dipukul mundur oleh Spanyol
1958	Spanyol menggabungkan Saguia el-Hamra dan Rio de Oro (wilayah di Sahara) menjadi wilayah Spanyol Sahara sehingga menjadi provinsi dari Spanyol.
1960s	Maroko mencanangkan <i>Greater Morocco</i> yang membuatnya mengklaim daerah Sahara Barat dan Mauritania. Tetapi OAU mengakui kemerdekaan Mauritania dan harapan terakhir Maroko hanyalah mendapatkan Sahara Barat.

1973	Terbentuknya Front Polisario yang bertujuan mengusir Spanyol lalu perang gerilya mulai bergeser dan dilancarkan terhadap Maroko yang berada diwilayahnya.
1975 Okt.	Atas desakan berbagai pihak, Spanyol melepaskan Sahara Barat tanpa adanya pemerintahan sendiri.
1975 Nov.	ICJ (International Court of Justice) memutuskan bahwa Spanyol tidak seharusnya mengendalikan Spanyol Sahara. Maroko dan Mauritania yang mempunyai hubungan sejarah juga tidak seharusnya menghalangi referendum Sahara.
1975 Nov.	<i>The Green March</i> terjadi dan Maroko mengirim tentara serta rakyatnya ke Sahara Barat dalam rangka menguasai wilayah Sahara. Aljazair yang melihat langkah besar ini membuatnya mendukung Polisario dalam menuju referendum.
	Penandatanganan “Kesepakatan Madrid 1975” diantara Spanyol, Mauritania dan Maroko yang membuat Spanyol meninggalkan Sahara Barat.
1975- 1991	Perang di Sahara Barat. (Angkatan udara Maroko membom kamp-kamp pengungsi di padang pasir dan menyebabkan pelarian Sahrawi ke Tindouf, Aljazair. Polisario menyerang mobil-mobil penambang fosfat. Polisario melakukan serangan gerilya di kapal Spanyol yang sedang menangkap ikan di perairan atlantik)

1976 Feb.	The Sahrawi Arab Democratic Republic (SADR) mulai berdiri sebagai pemerintahan yang sah di Sahara Barat.
1979 Agust.	Mauritania dan Polisario menandatangani perjanjian damai yang mengakhiri klaim wilayah Rio de Oro oleh Mauritania
1979 Agust.	Maroko menganeksasi semua wilayah Sahara Barat dan mengklaim wilayah yang telah ditinggalkan Mauritania sebagai daerah kekuasaannya.
1980s	Maroko membangun tanggul untuk melindungi provinsi Rio de Oro dari Front Polisario.
1984	SADR mendapatkan kursi di OAU/AU. Kemudian Maroko yang tidak setuju pun meninggalkan organisasi ini
1991 Sept.	Genjatan senjata diadakan oleh Polisario dan Maroko. PBB mendorong dilakukannya referendum untuk menentukan status akhir Sahara Barat
1991	PBB mengeluarkan resolusi Dewan Keamanan No. 690 dan mengirimkan pasukan penjaga perdamaian MINURSO untuk mengawasi jalannya proses referendum.
1997	Kofi Annan menunjuk James Baker (Menteri Luar Negeri AS) sebagai perwakilan khusus di Sahara Barat.
2001	Baker Plan I mengusulkan bahwa Sahara Barat harus diadakan Otonomi Khusus, tetapi Aljazair dan Polisario menolak.

2003 Baker Plan II mengusulkan membuat sebuah otoritas Sahara Barat yang akan memimpin pemerintahannya sendiri selama 5 tahun sebelum otonomi diadakan. Aljazair dan Polisario setuju tetapi Marokoo menolak karena kemungkinan besar Sahara Barat akan memutuskan referendum dan memilih merdeka.

2010– Present PBB yang diwakili oleh Envoy Cristopher RRoss telah mengadakan 9 putaran diskusi pembicaraan untuk menjembatani perbedaan antara Maroko dan Polisario atas setiap penyelesaian permasalahan di masa depan. Aljazair dan Mauritania adir sebagai pengamat. Sejauh ini belum ada yang terjadi untuk mengubah posisi Maroko atau Polisario.